Evaluasi Apakah APBN Benar-Benar Melindungi Masyarakat dari Shock Global

SHOCK GLOBAL



Energi & pangan



Kurs & arus modal



Rantai pasok & iklim

RESPONS APBN



Subsidi & kompensasi



Bansos



Transfer daerah & layanan



Cadangan pangan & investasi



Ruang fiskal

DAMPAK PADA WARGA



- Harga kebutuhan dasar lebih stabil
- Pendapatan rumah tangga lebih terjaga
- Akses layanan publik tetap tersedia
- Lapangan kerja lebih terpelihara
- Ketahanan rumah tangga lebih kuat

UJI PERLINDUNGAN

- Tepat sasaran
- Cakupan cukup
- Manfaat memadai
- Layanan tetap berjalan
- Cepat disalurkan
- Fiskal berkelanjutan

APBN dapat meredam guncangan—hasilnya bergantung pada ketepatan sasaran, kecepatan, kecukupan manfaat, dan keberlanjutan fiskal.

Potret s.d. 30 Sep 2026: bansos Rp115,8 T | subsidi & kompensasi Rp376,8 T | defisit 1,24% PDB.
Realisasi menunjukkan skala, bukan bukti dampak kausal.

Evaluasi Apakah APBN Benar-Benar Melindungi Masyarakat dari Shock Global

Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD

www.rudyct.com/cv.pdf

IBM-ASMI · RudyCT Academic Series

Abstract

This article evaluates whether Indonesia's State Budget (APBN) genuinely protects people from global shocks. It treats protection as an outcome to be examined across four dimensions: whether a shock is absorbed rather than fully passed through to household prices and incomes; whether support reaches exposed groups in time; whether essential public services and productive activity are maintained; and whether the response preserves fiscal capacity for future risks. Global shocks—including energy and food price spikes, tighter international financial conditions, exchange-rate volatility, geopolitical disruption, and climate-related supply shocks—affect households and firms through different channels. APBN instruments such as energy subsidies and compensation, social assistance, food security spending, transfers to regions, public investment, and tax measures can cushion these effects, but each has different targeting, timing, and fiscal costs. October 2026 budget data show substantial realized support alongside a still-contained deficit, yet expenditure totals alone cannot demonstrate causal effectiveness or equitable incidence. The article proposes a practical evaluation framework combining exposure, adequacy, timeliness, coverage, service continuity, fiscal sustainability, and transparency. Its conclusion is that APBN can function as a shock absorber, but protection is conditional and uneven; the central policy challenge is to strengthen targeted, adaptive protection while preserving credibility and productive investment.

Kata kunci: APBN; shock global; perlindungan sosial; subsidi energi; daya beli; ketahanan fiskal; Indonesia.

1. Pendahuluan

Perubahan harga minyak dunia, gejolak pangan, kenaikan suku bunga internasional, pelemahan nilai tukar, perang, gangguan logistik, dan bencana

iklim dapat terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, guncangan eksternal tersebut masuk ke rumah tangga melalui harga bahan bakar, ongkos angkutan, pangan, pupuk, biaya pinjaman, kesempatan kerja, dan pendapatan usaha. Ketika harga impor naik atau permintaan ekspor turun, dampaknya menyebar melalui rantai pasok dan pasar tenaga kerja. Persoalan kebijakan bukan hanya apakah guncangan terjadi, melainkan siapa yang menanggung biayanya dan apakah lembaga publik mampu mengurangi kerusakan sosial maupun ekonomi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering disebut sebagai "shock absorber" atau peredam guncangan. Istilah tersebut menggambarkan kapasitas fiskal untuk menyerap sebagian tekanan agar seluruh perubahan harga dan pendapatan global tidak langsung dibebankan kepada masyarakat. APBN dapat menjaga harga energi tertentu, menyalurkan bantuan sosial, mendukung pasokan pangan, membantu pemerintah daerah, memperluas layanan kesehatan dan pendidikan, serta mempertahankan investasi publik. Ia juga dapat memengaruhi permintaan agregat dan lapangan kerja.

Akan tetapi, sebutan sebagai peredam tidak dengan sendirinya membuktikan efektivitas. Pemerintah mungkin membelanjakan dana dalam jumlah besar, tetapi bantuan terlambat, penerimanya tidak tepat, nilainya tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup, atau prosedurnya sulit diakses. Subsidi dapat menahan harga tetapi lebih banyak dinikmati kelompok yang mengonsumsi energi dalam jumlah besar. Sebaliknya, kebijakan fiskal yang sangat hemat dapat menjaga defisit namun membiarkan kelompok rentan menghadapi penurunan konsumsi dan layanan. Evaluasi harus menilai hasil dan distribusi beban, bukan sekadar niat, pagu, atau realisasi belanja.

Kementerian Keuangan dalam #APBNKiTa edisi Oktober 2026 melaporkan realisasi hingga 30 September: pendapatan negara Rp2.341,5 triliun atau 74,2% dari target, belanja negara Rp2.660,5 triliun atau 69,2% dari pagu, serta defisit Rp319 triliun atau 1,24% PDB. Dalam periode yang sama, pemerintah

melaporkan realisasi bantuan sosial Rp115,8 triliun, subsidi dan kompensasi Rp376,8 triliun, transfer ke daerah Rp599,2 triliun, anggaran pendidikan Rp574,2 triliun, kesehatan Rp161,8 triliun, dan ketahanan pangan Rp113,3 triliun. Angka tersebut menunjukkan kapasitas dan skala instrumen fiskal yang digunakan, tetapi belum menjawab berapa besar guncangan yang benar-benar diserap, siapa penerima akhirnya, atau bagaimana kondisi mereka tanpa dukungan tersebut.

Konteks global saat itu juga memperlihatkan tekanan yang tidak tunggal. Bank Indonesia menyatakan ketegangan geopolitik di Timur Tengah menjaga harga minyak dan komoditas dunia tetap tinggi; imbal hasil US Treasury dan preferensi investor terhadap aset emerging markets turut menciptakan tekanan. Rupiah pada 20 Oktober 2026 tercatat Rp17.985 per dolar AS, sementara inflasi September 3,28% secara tahunan. Angka-angka itu tidak membuktikan bahwa APBN gagal maupun berhasil. Inflasi dapat tetap terkendali karena kombinasi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, pasokan, harga global, cuaca, dan permintaan domestik. Dampak kausal memerlukan pembandingan dengan keadaan yang mungkin terjadi tanpa kebijakan.

Artikel ini bertujuan mengevaluasi apakah APBN benar-benar melindungi masyarakat dari shock global. Pertama, artikel membedakan jenis guncangan dan jalur transmisinya. Kedua, artikel menjelaskan instrumen fiskal yang dapat meredam dampak. Ketiga, disusun kerangka evaluasi yang menilai ketepatan sasaran, kecukupan, kecepatan, cakupan, keberlanjutan, dan transparansi. Keempat, realisasi APBN 2026 digunakan sebagai ilustrasi bertanggal dengan kehati-hatian interpretasi. Kesimpulan utamanya ialah APBN memiliki instrumen yang nyata dan dapat mengurangi sebagian tekanan, tetapi daya lindungnya bergantung pada desain program, kapasitas pelaksanaan, distribusi manfaat, serta ketahanan fiskal jangka menengah.

2. Apa yang dimaksud melindungi masyarakat?

Perlindungan tidak berarti pemerintah meniadakan seluruh dampak guncangan global. Ekonomi terbuka selalu terhubung dengan harga komoditas, arus modal, perdagangan, dan kondisi keuangan dunia. Mempertahankan semua harga domestik pada tingkat yang sama dalam setiap keadaan dapat menimbulkan biaya fiskal sangat besar, merusak sinyal kelangkaan, dan mendorong konsumsi yang tidak efisien. Perlindungan yang realistis berarti mencegah guncangan berubah menjadi penurunan kesejahteraan yang berlebihan, permanen, atau terkonsentrasi pada kelompok yang kemampuan menanggung risikonya paling rendah.

Ada sekurangnya empat hasil yang dapat digunakan untuk menilai perlindungan. Pertama, **perlindungan konsumsi**: rumah tangga tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, energi, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan. Kedua, **perlindungan pendapatan dan pekerjaan**: pekerja dan usaha tidak kehilangan mata pencaharian secara drastis akibat kontraksi yang sebetulnya dapat diredam. Ketiga, **perlindungan layanan publik**: kualitas dan akses layanan dasar tetap terjaga ketika pendapatan daerah atau pusat tertekan. Keempat, **perlindungan kapasitas masa depan**: respons hari ini tidak menciptakan beban utang dan kewajiban yang menutup ruang anggaran untuk generasi mendatang.

Perlindungan juga memiliki dimensi distribusi. Rata-rata inflasi atau pertumbuhan nasional dapat terlihat baik sementara kelompok tertentu menghadapi kenaikan biaya jauh lebih besar. Rumah tangga berpendapatan rendah membelanjakan porsi pendapatan lebih besar untuk pangan dan transportasi. Petani kecil dapat terdampak harga pupuk, pakan, dan bahan bakar, sementara pekerja informal mungkin tidak memiliki perlindungan upah maupun jaminan kehilangan pekerjaan. Daerah terpencil menghadapi biaya distribusi dan akses layanan yang berbeda dari pusat kota. Evaluasi perlu mengamati variasi tersebut.

Keempat dimensi tadi menuntut perspektif kontrafaktual: apa yang kemungkinan terjadi jika program tidak ada? Jika harga bahan bakar tetap naik, bantuan tunai diberikan, dan konsumsi rumah tangga hanya sedikit turun, dapatkah penurunan itu diatribusikan pada bantuan? Diperlukan pembanding, data sebelum-sesudah, variasi paparan, atau metode evaluasi lain. Tanpa itu, realisasi belanja hanya menunjukkan bahwa instrumen digunakan, bukan bahwa instrumen menyebabkan perlindungan.

3. Ragam shock global dan jalur transmisinya

3.1 Guncangan harga energi dan pangan

Kenaikan minyak, gas, batu bara, gandum, kedelai, pupuk, dan pakan dapat menaikkan biaya produksi serta biaya transportasi. Harga energi menyebar ke ongkos angkut, listrik, bahan baku, dan biaya layanan. Pangan global memengaruhi harga domestik melalui impor langsung maupun input produksi. Walaupun Indonesia memproduksi banyak komoditas, harga domestik tetap dipengaruhi biaya pengganti, musim, stok, distribusi, dan keterkaitan pasar.

Dampak bergantung pada intensitas impor dan struktur pasar. Produsen dapat menyerap sebagian kenaikan melalui margin, menaikkan harga jual, mengubah ukuran produk, atau mengurangi produksi. Pemerintah dapat menahan sebagian harga energi melalui subsidi dan kompensasi, atau menjaga stok serta distribusi pangan melalui belanja dan logistik. Namun harga yang ditahan tidak menghapus biaya ekonomi; biaya tersebut berpindah ke anggaran, badan usaha, atau pembayar pajak di masa depan.

3.2 Suku bunga global dan arus modal

Kenaikan suku bunga negara maju dapat membuat aset internasional lebih menarik, menaikkan biaya pinjaman pemerintah dan perusahaan, serta memicu arus modal keluar. Perubahan ini dapat menekan nilai tukar,

menurunkan harga obligasi, dan meningkatkan biaya pembiayaan. Perusahaan dengan utang valuta asing dan pendapatan rupiah lebih rentan. APBN berinteraksi dengan risiko tersebut melalui kebutuhan pembiayaan, struktur utang, pembayaran bunga, belanja perlindungan, serta pengelolaan kepercayaan investor.

Jika pemerintah harus membayar bunga lebih besar, ruang untuk belanja kesehatan, pendidikan, atau perlindungan sosial dapat berkurang. Jika biaya pembiayaan naik untuk perusahaan, investasi dan perekrutan bisa tertunda. APBN dapat mengurangi dampak melalui stabilitas makro dan layanan publik, tetapi tidak dapat menggantikan manajemen risiko valas sektor swasta atau mengontrol suku bunga global.

3.3 Gangguan perdagangan dan rantai pasok

Konflik geopolitik, pembatasan ekspor, hambatan pelayaran, atau gangguan produksi dapat memperpanjang waktu pengiriman dan menurunkan ketersediaan barang. Pelaku usaha membutuhkan modal kerja lebih besar untuk menyimpan stok dan mencari pemasok alternatif. Barang modal dan input penting dapat tertunda, sehingga investasi dan produksi domestik ikut melambat. Pemerintah dapat merespons melalui pengadaan strategis, fasilitasi logistik, diversifikasi pemasok, atau bantuan sementara kepada sektor kritis.

3.4 Guncangan iklim dan bencana lintas batas

Kekeringan, banjir, gelombang panas, kebakaran, dan gangguan iklim di negara produsen dapat memengaruhi harga pangan dan energi. Guncangan ini sering bersifat lokal sekaligus global: gagal panen di satu wilayah meningkatkan harga, sementara banjir di dalam negeri memutus distribusi dan merusak aset. APBN dapat membiayai respons darurat, bantuan, rekonstruksi, asuransi, infrastruktur tahan iklim, dan sistem peringatan. Respons yang hanya bersifat darurat tanpa investasi pencegahan dapat menyebabkan kerugian berulang.

3.5 Guncangan permintaan global

Perlambatan ekonomi mitra dagang dapat menurunkan permintaan ekspor, harga komoditas, dan pendapatan sektor terkait. Daerah penghasil komoditas mungkin mengalami penurunan penerimaan, lapangan kerja, serta belanja lokal. APBN dan transfer ke daerah dapat membantu mempertahankan layanan dan konsumsi, tetapi penurunan penerimaan perpajakan atau royalti dapat bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan belanja.

4. Instrumen APBN sebagai peredam guncangan

4.1 Subsidi dan kompensasi energi

Subsidi menurunkan harga yang dibayar pengguna; kompensasi mengganti biaya atau selisih yang ditanggung badan usaha untuk memenuhi kebijakan tertentu. Instrumen ini dapat melindungi rumah tangga dan usaha dari perubahan harga energi yang tajam, mengurangi inflasi biaya, dan memberi waktu bagi penyesuaian. Efek langsungnya mudah dipahami publik karena muncul pada harga yang dibayar.

Tantangannya ialah ketepatan sasaran dan besarnya biaya. Subsidi harga universal cenderung memberi manfaat nominal lebih besar kepada pengguna yang membeli lebih banyak energi. Kelompok miskin mungkin terlindungi secara absolut, tetapi manfaat relatif terhadap pendapatan bisa lebih kecil daripada bantuan yang secara khusus ditujukan kepada mereka. Subsidi juga dapat mendorong konsumsi energi berlebih, menekan investasi efisiensi, dan meningkatkan emisi. Di sisi fiskal, harga minyak dan kurs dapat menaikkan tagihan subsidi dengan cepat.

Subsidi terarah dapat meningkatkan efisiensi distribusi manfaat, tetapi menuntut data penerima yang mutakhir, mekanisme verifikasi, perlindungan terhadap kesalahan eksklusi, dan akses pengaduan. Sistem penargetan digital membantu tetapi tidak otomatis akurat. Identitas atau data yang tidak sinkron dapat membuat rumah tangga berhak kehilangan akses. Reformasi subsidi

harus menggabungkan perbaikan data, komunikasi, kompensasi, dan penyediaan alternatif seperti transportasi publik.

4.2 Bantuan sosial dan transfer pendapatan

Bantuan tunai atau pangan dapat melindungi konsumsi kelompok rentan secara lebih langsung. Program yang telah memiliki basis penerima dapat diperluas saat guncangan tanpa membangun sistem baru dari awal. Bantuan temporer dapat menjaga kemampuan membeli pangan, membayar transportasi, mempertahankan anak di sekolah, dan mengakses kesehatan.

Efektivitas bergantung pada empat hal: siapa yang menerima, berapa besar nilai manfaat, kapan diterima, dan berapa lama dukungan berlangsung. Bantuan yang terlambat setelah keluarga menjual aset produktif atau berutang mahal memiliki daya lindung yang lebih kecil. Nilai bantuan yang tidak mengikuti perubahan harga keranjang dasar dapat cepat kehilangan daya beli. Penyaluran digital yang efisien tetap perlu didukung saluran tunai atau layanan langsung bagi masyarakat tanpa rekening, perangkat, atau konektivitas memadai.

Bantuan sosial tidak seharusnya menggantikan kebijakan penciptaan pekerjaan, produktivitas, dan layanan dasar. Sebaliknya, pada masa krisis, perlindungan konsumsi memberi ruang bagi keluarga agar tidak mengambil keputusan yang merusak kapasitas masa depan, seperti menghentikan sekolah atau menjual alat kerja. Hubungan dengan pelatihan, layanan penempatan, kesehatan, dan pengembangan usaha dapat meningkatkan dampak jangka panjang bila tidak membuat akses bantuan menjadi terlalu bersyarat dan rumit.

4.3 Ketahanan pangan dan stabilisasi pasokan

Belanja ketahanan pangan dapat mencakup subsidi input, dukungan produksi, irigasi, cadangan, pembelian hasil, penyimpanan, dan distribusi. Cadangan pangan yang dikelola baik dapat membantu memenuhi kebutuhan

saat pasokan terganggu dan menahan lonjakan harga yang tidak sejalan dengan biaya fundamental. Investasi irigasi dan penyuluhan dapat mengurangi kerentanan produksi terhadap cuaca.

Namun penahanan harga melalui pembelian pemerintah perlu memperhatikan kapasitas penyimpanan, kualitas, ketepatan waktu, insentif petani, biaya angkut, dan kondisi pasar. Harga yang terlalu rendah bagi produsen dapat melemahkan insentif produksi; harga terlalu tinggi bagi konsumen membebani keluarga. Transparansi stok dan keputusan intervensi membantu menjaga kepercayaan dan mencegah spekulasi.

4.4 Transfer ke daerah dan kesinambungan layanan

Transfer pusat ke daerah menjaga kemampuan pemerintah daerah menyediakan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan administrasi. Ketika guncangan mengurangi pendapatan lokal, transfer yang dapat diprediksi mencegah pemotongan layanan secara tajam. Daerah menghadapi dampak yang berbeda: wilayah penghasil komoditas sensitif terhadap harga ekspor, sementara wilayah rawan bencana memerlukan belanja respons dan pemulihan lebih besar.

Formula transfer yang memperhitungkan kebutuhan layanan, kapasitas fiskal, kemiskinan, risiko bencana, dan biaya geografis dapat meningkatkan pemerataan. Namun transfer harus disertai kapasitas perencanaan, pengadaan, dan pengawasan di tingkat daerah. Penyaluran yang lambat atau penggunaan yang tidak sesuai dapat memperlemah fungsi perlindungan.

4.5 Belanja publik dan dukungan usaha

Belanja infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik dapat menahan dampak guncangan sekaligus menjaga produktivitas jangka panjang. Pemeliharaan jalan dan irigasi membantu pasokan; layanan kesehatan mengurangi beban rumah tangga; program padat karya dapat menyediakan pendapatan sementara. Insentif pajak atau pembiayaan usaha

dapat membantu perusahaan mempertahankan tenaga kerja dan investasi selama guncangan sementara.

Dukungan usaha perlu selektif, transparan, dan memiliki batas waktu. Bantuan yang terus diberikan kepada perusahaan tidak produktif dapat memindahkan risiko privat kepada publik dan menghambat perubahan struktural. Kriteria dapat mencakup tingkat kepentingan layanan, jumlah pekerjaan yang dipertahankan, rencana pemulihan, dan kewajiban pelaporan. Untuk usaha kecil, akses informasi dan modal kerja mungkin lebih efektif daripada insentif pajak yang hanya dapat digunakan perusahaan yang sudah memiliki laba kena pajak.

4.6 Kebijakan penerimaan dan pembiayaan

Pemerintah dapat menyesuaikan pajak, bea, atau pungutan tertentu saat guncangan, tetapi penurunan penerimaan berpotensi mempersempit ruang fiskal. Perubahan pajak harus dibandingkan dengan bantuan langsung dan belanja layanan. Keringanan pajak luas dapat memberi manfaat besar kepada pihak yang tidak paling terdampak dan mungkin tidak diteruskan kepada konsumen atau pekerja.

Pembiayaan defisit memungkinkan pemerintah mempertahankan belanja ketika penerimaan menurun atau kebutuhan meningkat. Ini merupakan fungsi stabilisasi yang penting, tetapi perlu dibatasi oleh keberlanjutan utang dan kemampuan membayar bunga. Cadangan fiskal, saldo anggaran lebih, pengelolaan kas, dan profil jatuh tempo dapat membuat respons lebih terukur. Penggunaan utang untuk menghadapi guncangan sementara dapat dibenarkan jika manfaat perlindungan dan pemulihan lebih besar daripada biaya pembiayaan jangka panjang.

5. Kerangka evaluasi: apakah perlindungan benar-benar bekerja?

Evaluasi APBN perlu menggabungkan pertanyaan kuantitatif dan kualitatif. Tabel anggaran memberikan informasi penting, tetapi perlu dilengkapi data

penerima, harga, konsumsi, pekerjaan, layanan, serta pengalaman masyarakat. Berikut tujuh dimensi evaluasi.

5.1 Kecocokan dengan guncangan

Apakah instrumen dipilih sesuai sumber masalah? Kenaikan harga energi global, kegagalan panen domestik, dan hilangnya pekerjaan memerlukan respons berbeda. Subsidi BBM mungkin relevan untuk menahan lonjakan biaya transportasi pada jangka pendek, tetapi tidak memecahkan masalah pendapatan rumah tangga yang kehilangan pekerjaan. Bantuan tunai dapat melindungi konsumsi, tetapi tidak memulihkan pasokan pangan yang terputus. Kecocokan berarti kebijakan memengaruhi jalur yang menyebabkan kerugian.

5.2 Ketepatan sasaran dan insidensi manfaat

Siapa yang secara formal berhak dan siapa yang benar-benar menikmati manfaat? Untuk subsidi, analisis perlu mengukur manfaat menurut desil pendapatan, konsumsi, jenis kendaraan, lokasi, dan status pelanggan. Untuk bantuan sosial, perlu mengukur kesalahan inklusi dan eksklusi, penerimaan ganda, keterjangkauan, serta mekanisme pengaduan. Untuk belanja layanan, penerima manfaat bukan hanya pengguna langsung; perlu dilihat juga manfaat eksternalitas dan distribusi geografis.

5.3 Kecukupan nilai manfaat

Berapa besar bantuan dibandingkan kenaikan biaya hidup atau kehilangan pendapatan? Ukuran nasional seperti inflasi rata-rata tidak cukup jika kelompok sasaran menghadapi keranjang konsumsi yang berbeda. Evaluasi dapat menghitung perubahan biaya kebutuhan pokok bagi kelompok pendapatan tertentu, proporsi guncangan yang dikompensasi, dan apakah bantuan mencegah keluarga jatuh ke kemiskinan atau mengurangi konsumsi esensial.

5.4 Ketepatan waktu dan cakupan

Berapa lama dari keputusan hingga penerimaan? Apakah bantuan sampai sebelum keluarga menguras tabungan, berutang mahal, atau menjual aset kerja? Cakupan perlu mengukur proporsi populasi terdampak yang menerima manfaat, bukan hanya jumlah pembayaran. Respons cepat tetapi salah sasaran, atau tepat sasaran tetapi datang terlambat, sama-sama memiliki keterbatasan.

5.5 Dampak terhadap layanan dan pekerjaan

Apakah sekolah, puskesmas, transportasi, air, listrik, dan layanan dasar tetap berjalan? Apakah program mempertahankan pekerjaan atau hanya menopang keuntungan pemilik usaha? Indikator dapat meliputi jam layanan, kehadiran tenaga, waktu tunggu, jumlah usaha bertahan, jam kerja, upah riil, dan tingkat pengembalian pekerja ke pekerjaan.

5.6 Efisiensi biaya dan keberlanjutan fiskal

Berapa biaya fiskal per penerima atau per satuan kerugian yang berhasil dihindari? Apakah kewajiban subsidi, kompensasi, dan jaminan tercatat lengkap? Bagaimana dampaknya pada defisit, bunga, utang, dan ruang belanja masa depan? Perlindungan hari ini tidak boleh dinilai tanpa memperhitungkan pembayarannya di masa depan. Namun penghematan jangka pendek juga tidak boleh dianggap berhasil bila mengakibatkan kerusakan sosial yang lebih mahal.

5.7 Transparansi dan akuntabilitas

Apakah tujuan, kriteria, biaya, hasil, dan risiko dipublikasikan? Apakah perubahan kebijakan dijelaskan? Apakah penerima dapat mengajukan koreksi? Data terbuka memungkinkan audit independen dan pembelajaran. Pelaporan harus membedakan pagu, komitmen, penyaluran, realisasi kas, serta hasil akhir agar angka tidak disalahartikan.

6. Membaca data APBN 2026 dengan hati-hati

Data #APBNKiTa sampai 30 September 2026 menunjukkan besarnya respons dan layanan yang dibiayai. Realisasi bansos mencapai Rp115,8 triliun, subsidi dan kompensasi Rp376,8 triliun, program Makan Bergizi Gratis Rp153,2 triliun, pendidikan Rp574,2 triliun, kesehatan Rp161,8 triliun, dan ketahanan pangan Rp113,3 triliun. Transfer ke daerah tercatat Rp599,2 triliun. Pemerintah melaporkan transfer tersebut mendukung gaji ASN daerah, peserta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, BOS, tunjangan guru, layanan air minum dan jalan, penguatan RSUD, serta Dana Desa.

Dari sisi fiskal, pendapatan Rp2.341,5 triliun dan belanja Rp2.660,5 triliun menghasilkan defisit Rp319 triliun atau 1,24% PDB. Pembiayaan utang neto tercatat Rp494,3 triliun, sedangkan keseimbangan primer masih surplus Rp125,5 triliun. Data ini menunjukkan ruang fiskal digunakan untuk membiayai program dan pembiayaan, tetapi tidak dengan sendirinya menentukan apakah respons optimal. Penilaian memerlukan informasi kewajiban yang belum dibayar, komitmen kompensasi, proyeksi hingga akhir tahun, dan kebutuhan belanja setelah shock berlanjut.

Realisasi subsidi dan kompensasi sebesar Rp376,8 triliun mencerminkan skala perlindungan harga dan dukungan kepada penyedia tertentu. Untuk mengetahui daya lindungnya, perlu dihitung berapa perubahan harga energi yang tidak diteruskan ke konsumen, bagaimana manfaat terbagi menurut pendapatan, dan berapa tagihan fiskal jika harga minyak atau kurs bergerak lebih jauh. Besaran belanja bukan ukuran efisiensi; biaya perlu dibandingkan dengan manfaat konsumen, stabilitas layanan, serta potensi alternatif bantuan yang lebih terarah.

Realisasi bansos Rp115,8 triliun juga harus dinilai berdasarkan jumlah keluarga yang menerima, frekuensi dan nilai transfer, waktu penyaluran, kecukupan terhadap kenaikan kebutuhan, serta kesalahan data. Angka total tidak menjawab apakah pekerja informal baru yang kehilangan pendapatan

masuk dalam cakupan, apakah lansia dan penyandang disabilitas dapat menerima bantuan dengan mudah, atau apakah keluarga di daerah terpencil menghadapi biaya penarikan yang tinggi.

Anggaran pendidikan, kesehatan, dan transfer daerah memiliki fungsi perlindungan tidak langsung. Ketika pendapatan rumah tangga berkurang, akses layanan publik yang tetap tersedia membantu mencegah keluarga mengeluarkan biaya privat lebih besar atau menghentikan layanan. Namun anggaran sektoral yang besar belum memastikan mutu dan pemerataan layanan. Perlu data mengenai ketersediaan obat, tenaga kesehatan, kehadiran guru, kualitas pembelajaran, dan variasi antardaerah.

6.1 Bukti ilmiah dan batas interpretasi

Sebuah studi Indonesia yang diterbitkan dalam *Indonesian Treasury Review* pada September 2026 menggunakan data runtun waktu 1990–2025 dan Error Correction Model untuk menelaah hubungan guncangan global, subsidi BBM, dan defisit. Penulis melaporkan hubungan jangka panjang antara variabel tersebut dan mengidentifikasi subsidi BBM sebagai saluran yang membantu meredam sebagian transmisi shock terhadap posisi fiskal dan daya beli. Studi itu menyarankan penguatan bantalan kas dan subsidi digital yang lebih terarah.

Temuan tersebut relevan, tetapi perlu dibaca dalam batas metode. Model runtun waktu menunjukkan pola hubungan dinamis, tetapi tidak secara otomatis mengidentifikasi dampak pada setiap kelompok rumah tangga. Periode panjang dapat mencakup perubahan rezim dan kebijakan; hasil agregat tidak menjelaskan distribusi manfaat. Untuk melengkapi bukti, diperlukan analisis mikro rumah tangga, data harga dan konsumsi, evaluasi program, serta perbandingan desain subsidi dan bantuan tunai.

6.2 Mengapa hasil makro tidak cukup

Inflasi 3,28% tahunan atau pertumbuhan 5,45% pada semester pertama 2026 dapat menjadi indikator ketahanan agregat, tetapi tidak membuktikan bahwa semua kelompok terlindungi. Harga pangan tertentu dapat naik jauh di atas rata-rata; pendapatan pekerja informal mungkin tertahan; usaha kecil dapat kehilangan margin; daerah rawan bencana dapat mengalami gangguan layanan. Demikian pula, defisit yang rendah dapat menunjukkan disiplin, tetapi belum tentu mengungkap apakah belanja perlindungan cukup atau ada kebutuhan yang tidak dipenuhi.

Kausalitas juga sulit dipastikan karena guncangan dan respons berlangsung bersama. Harga global dapat mereda; panen dapat membaik; BI dapat menaikkan suku bunga atau melakukan stabilisasi; perusahaan dapat menyerap biaya; keluarga dapat mengubah konsumsi. Evaluasi APBN perlu memisahkan kontribusi setiap faktor dengan desain penelitian yang sesuai dan menghindari klaim keberhasilan berdasarkan satu indikator.

6.3 Rancangan evaluasi yang lebih operasional

Untuk menguji perlindungan APBN secara lebih kuat, evaluasi dapat dimulai dengan menetapkan guncangan dan kelompok yang terpapar sebelum melihat hasil program. Misalnya, jika yang diuji adalah kenaikan harga energi, peneliti dapat menentukan perubahan biaya transportasi dan energi rumah tangga, lalu membandingkan keluarga menurut intensitas penggunaan energi dan akses terhadap subsidi atau bantuan. Perbandingan tersebut perlu mengendalikan perubahan pendapatan, lokasi, ukuran keluarga, cuaca, dan harga pangan agar dampak program tidak tercampur dengan faktor lain.

Data administratif penyaluran dapat dipadankan secara aman dengan survei pengeluaran, harga lokal, catatan pekerjaan, dan ketersediaan layanan. Analisis kuantitatif dapat menggunakan perbedaan waktu dan intensitas paparan antarwilayah, sementara wawancara memberi penjelasan mengapa

bantuan terlambat, tidak diterima, atau dianggap cukup. Kedua jenis bukti saling melengkapi. Survei menggambarkan pola umum, sedangkan wawancara dan studi kasus menerangkan proses yang menghubungkan rancangan kebijakan dengan pengalaman warga.

Evaluasi perlu memisahkan tiga tingkat hasil. Tingkat pertama adalah keluaran administratif, seperti jumlah transfer dan jumlah penerima. Tingkat kedua adalah hasil antara, misalnya penurunan pengeluaran energi bersih, stabilnya kehadiran siswa, atau berlanjutnya produksi usaha. Tingkat ketiga adalah hasil kesejahteraan, seperti kemiskinan, gizi, kesehatan, keamanan pangan, dan kemampuan rumah tangga mempertahankan aset produktif. Perubahan pada tingkat pertama tidak otomatis menghasilkan perubahan pada tingkat ketiga bila nilai bantuan kecil, harga barang tetap tinggi, atau layanan di daerah tidak tersedia.

Selain rata-rata, laporan perlu menyajikan distribusi dampak. Median penerimaan dapat menyembunyikan rumah tangga yang tidak mendapat bantuan sama sekali. Angka nasional dapat menutupi daerah yang mengalami keterlambatan, sementara kelompok disabilitas atau pekerja migran mungkin tidak tercakup dalam definisi penerima. Karena itu, evaluasi perlu memuat estimasi berdasarkan desil pendapatan, gender, status pekerjaan, wilayah, akses digital, dan jenis rumah tangga, disertai penjelasan kualitas data.

Counterfactual dapat dibangun melalui beberapa strategi yang disesuaikan dengan etika dan kelayakan. Jika perluasan program dilakukan bertahap, wilayah yang menerima lebih awal dapat dibandingkan dengan wilayah yang menerima kemudian, dengan syarat tren sebelumnya cukup sebanding. Jika ada ambang kelayakan, analisis dapat membandingkan keluarga di sekitar ambang tersebut. Bila eksperimen tidak mungkin, pemodelan harga dan konsumsi serta simulasi mikro dapat memperkirakan dampak alternatif, tetapi asumsi dan ketidakpastian harus dilaporkan secara terbuka. Tidak ada satu metode yang selalu unggul untuk semua program.

Terakhir, evaluasi harus dilakukan pada beberapa horizon waktu. Dalam beberapa minggu, ukuran utama mungkin kecepatan transfer, ketersediaan bahan bakar, dan perubahan harga. Dalam beberapa bulan, pengamatan bergeser pada konsumsi, utang rumah tangga, kelangsungan usaha, dan kehadiran sekolah. Dalam jangka lebih panjang, perhatian mencakup produktivitas, kesehatan, pendidikan, utang publik, serta ketahanan terhadap shock berikutnya. Pendekatan bertahap mencegah keberhasilan sesaat dianggap sebagai solusi struktural dan mencegah investasi pencegahan dinilai terlalu dini.

7. Kekuatan perlindungan APBN

Pertama, APBN menyediakan skala dan kapasitas pembiayaan yang tidak dapat ditanggung rumah tangga atau daerah secara individual. Pemerintah dapat membagi risiko antarwilayah dan antarwaktu melalui pajak, transfer, cadangan, serta pembiayaan. Dalam guncangan besar, mekanisme ini membantu menghindari penyesuaian serentak yang memperdalam kontraksi.

Kedua, subsidi dan kompensasi dapat meredam pass-through harga energi dengan cepat ketika mekanisme penyesuaian harga dan penyaluran telah tersedia. Bagi sektor transportasi, pangan, dan layanan publik, kestabilan biaya energi juga membantu mengurangi ketidakpastian jangka pendek. Ketiga, jaringan bansos dan layanan kesehatan atau pendidikan memberi saluran untuk menjaga konsumsi dan akses layanan.

Keempat, transfer ke daerah dapat mempertahankan layanan dasar di tempat yang pendapatan lokalnya lemah atau guncangan regionalnya lebih berat. Kelima, APBN dapat menggabungkan perlindungan jangka pendek dengan investasi jangka panjang, misalnya irigasi, jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Keenam, kerangka anggaran dan kewenangan legislatif menciptakan proses legitimasi serta pengawasan yang dapat menopang kepercayaan apabila dijalankan transparan.

Ketujuh, APBN memberikan fleksibilitas untuk mengubah komposisi belanja dan menggunakan pembiayaan pada saat keadaan mendesak, sepanjang perubahan mengikuti aturan dan transparansi. Kedelapan, perlindungan melalui layanan universal dapat menjangkau warga yang belum tercatat dalam basis data kemiskinan. Dengan demikian, program yang tidak sepenuhnya targeted tetap dapat mempunyai nilai perlindungan, terutama untuk kebutuhan esensial.

8. Keterbatasan dan risiko perlindungan

Keterbatasan pertama adalah salah sasaran. Subsidi universal dapat mengalokasikan dana besar kepada rumah tangga yang tidak paling rentan, sementara data bantuan terarah dapat mengecualikan pekerja informal yang baru terdampak. Keterbatasan kedua adalah jeda pelaksanaan: keputusan anggaran, pengadaan, verifikasi, dan penyaluran dapat memakan waktu, sementara guncangan berkembang lebih cepat.

Ketiga, nilai bantuan dapat tidak memadai terhadap ukuran kerugian. Transfer dengan jumlah tetap kehilangan daya beli apabila harga kebutuhan naik berkepanjangan. Keempat, perlindungan harga dapat menciptakan beban fiskal yang sulit diprediksi karena biaya mengikuti harga komoditas dan kurs. Jika pemerintah menahan penyesuaian terlalu lama, tagihan dapat menumpuk pada badan usaha dan akhirnya kembali ke anggaran.

Kelima, dominasi subsidi harga dapat melemahkan insentif efisiensi dan transisi energi. Keenam, transfer fiskal dapat kurang responsif bila formula dan jadwalnya tidak menyesuaikan guncangan daerah. Ketujuh, program dapat terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan badan usaha, sehingga penerima mengalami administrasi berulang atau celah layanan.

Kedelapan, transparansi biaya kontinjensi sering terbatas. Kompensasi yang belum dibayar, jaminan, kewajiban BUMN, atau komitmen multi-tahun dapat

menyembunyikan biaya sebenarnya. Kesembilan, fokus menjaga agregat makro dapat membuat distribusi manfaat kurang diperhatikan. Kesepuluh, komunikasi kebijakan yang tidak jelas dapat mendorong penimbunan, salah paham, atau hilangnya kepercayaan.

8.1 Kelompok masyarakat dengan paparan berbeda

Evaluasi yang berorientasi pada masyarakat perlu membedakan paparan menurut sumber nafkah dan pola konsumsi. Petani kecil dapat terkena kombinasi harga pupuk, benih, bahan bakar, dan biaya angkut, tetapi kenaikan harga komoditas yang dijual juga dapat menambah pendapatan bagi sebagian produsen. Nelayan menghadapi biaya bahan bakar dan rantai dingin, sementara harga jual hasil tangkapan berubah menurut musim serta akses pasar. Karena itu, dukungan tidak cukup didasarkan pada label sektor; perlu dilihat posisi bersih setiap kelompok sebagai produsen, pekerja, dan konsumen.

Pekerja bergaji tetap lebih terlindungi bila upah dan pekerjaan stabil, tetapi daya beli mereka turun jika kebutuhan pokok naik lebih cepat daripada penyesuaian gaji. Pekerja informal dan harian dapat mengalami guncangan pendapatan sebelum program bantuan merespons, sebab tidak memiliki kontrak kerja, tabungan memadai, atau akses jaminan sosial yang setara. Untuk kelompok ini, perlindungan sosial adaptif dapat menjadi jembatan, sedangkan program padat karya dan layanan penempatan membantu memulihkan pendapatan ketika guncangan berlangsung lama.

Rumah tangga di wilayah terpencil menghadapi biaya barang yang lebih tinggi dan pilihan pemasok yang lebih terbatas. Bantuan tunai yang nominalnya sama secara nasional mungkin memberi daya beli yang berbeda karena harga dan ongkos perjalanan bervariasi. Pemerintah daerah dapat mengidentifikasi hambatan distribusi dan layanan, tetapi kapasitas fiskal serta administrasi mereka juga tidak seragam. Formula transfer yang

memperhatikan kebutuhan, biaya geografis, risiko bencana, dan kapasitas pendapatan membantu mengurangi perbedaan tersebut.

Lansia, penyandang disabilitas, keluarga dengan anak kecil, dan rumah tangga dengan beban kesehatan memerlukan dukungan yang mempertimbangkan akses dan biaya pengasuhan. Penyaluran yang hanya mengandalkan aplikasi atau rekening dapat menambah hambatan bagi penerima tertentu. Perlindungan yang adil menggabungkan pembayaran efisien dengan pusat layanan, mekanisme perwakilan yang aman, dan prosedur pengaduan yang tidak memerlukan biaya tinggi.

Pada tingkat perusahaan, usaha kecil sering lebih rentan daripada korporasi besar karena modal kerja terbatas, daya tawar rendah, dan akses pembiayaan lebih mahal. Guncangan harga dapat mengurangi stok dan memutus kegiatan usaha, lalu menurunkan pendapatan pekerja serta pemasok lokal. Dukungan yang dirancang baik dapat mencakup informasi pemasok, penjaminan kredit sementara, pelatihan arus kas, dan akses pasar, bukan hanya subsidi input. Kriteria bantuan perlu menjelaskan tujuan publik dan mencegah dukungan menjadi perlindungan permanen bagi kegiatan yang tidak layak.

Perbedaan paparan ini penting bagi penilaian hasil. Jika rata-rata konsumsi nasional tetap, sementara kelompok tertentu memangkas protein, menjual alat kerja, menunda pemeriksaan kesehatan, atau menarik anak dari sekolah, maka perlindungan belum cukup merata. Data distribusi dan pengalaman penerima membuat keberhasilan APBN lebih bermakna secara sosial.

9. Agenda penguatan kebijakan

9.1 Perlindungan sosial adaptif

Sistem perlindungan sosial perlu memiliki kemampuan memperluas cakupan ketika terjadi guncangan. Ini memerlukan data dinamis yang dapat diperbarui, indikator pemicu yang jelas, sistem pembayaran yang interoperabel, saluran

pengaduan, serta protokol untuk memasukkan rumah tangga yang terdampak tetapi belum terdaftar. Perlindungan adaptif tidak berarti setiap krisis harus membangun program baru; lebih efektif bila jaringan yang ada dapat ditingkatkan dengan cepat dan diawasi.

9.2 Subsidi yang lebih tepat dan transisi yang adil

Penargetan subsidi harus mempertimbangkan kemampuan pembayaran, penggunaan energi, lokasi, pekerjaan, dan ketersediaan alternatif. Perubahan kebijakan perlu dilakukan bertahap dengan perlindungan kompensasi yang disiapkan sebelum harga berubah. Penggunaan data digital dapat menurunkan kebocoran, tetapi harus menyediakan koreksi manual dan perlindungan privasi. Evaluasi perlu membandingkan biaya fiskal dan manfaat riil bagi berbagai kelompok.

9.3 Bantalan fiskal dan aturan kontinjensi

Pemerintah perlu membangun bantalan fiskal pada masa penerimaan kuat dan merumuskan aturan penggunaan cadangan saat guncangan. Kerangka risiko dapat menetapkan pemicu berbasis harga komoditas, pertumbuhan, bencana, atau indikator kesejahteraan. Pemicu harus transparan, tidak mekanistis, dan dapat ditinjau bila data berubah. Rencana kembali ke lintasan fiskal jangka menengah perlu disampaikan agar respons sementara tidak berubah menjadi kewajiban permanen tanpa pendanaan.

9.4 Fokus pada kelompok dan sektor yang terpapar

Dukungan dapat diarahkan kepada rumah tangga berpendapatan rendah, pekerja informal, petani, nelayan, UMKM, penyandang disabilitas, lansia, serta daerah rawan bencana. Namun selektivitas perlu didasarkan pada paparan dan kerugian, bukan hanya kategori administratif lama. Data survei dan dialog dengan organisasi lokal dapat mengungkap kelompok yang tidak terlihat dalam sistem formal.

9.5 Penguatan bukti dan evaluasi

Setiap program perlindungan perlu memiliki indikator hasil sejak awal, termasuk kelompok pembanding bila memungkinkan. Evaluasi cepat dapat memperkirakan cakupan dan ketepatan waktu; evaluasi dampak yang lebih mendalam menilai perubahan konsumsi, kemiskinan, pekerjaan, dan layanan. Data pembayaran harus dikaitkan dengan data harga, rumah tangga, lokasi, dan layanan dengan perlindungan privasi. Peneliti independen dan lembaga audit perlu dapat mengakses data yang relevan.

9.6 Koordinasi fiskal-moneter dan pusat-daerah

APBN beroperasi bersama kebijakan suku bunga, stabilisasi kurs, kebijakan perdagangan, dan kebijakan daerah. Bantuan fiskal yang menambah permintaan saat pasokan terganggu dapat meningkatkan inflasi; stabilisasi harga yang terlalu luas dapat menekan anggaran. Koordinasi membantu memilih instrumen yang tepat untuk sisi permintaan dan penawaran. Pemerintah pusat juga perlu menyalurkan informasi dan sumber daya kepada daerah dengan cepat, sambil mempertahankan akuntabilitas lokal.

10. Contoh evaluasi: lonjakan harga energi

Misalkan harga minyak dunia meningkat cepat disertai pelemahan rupiah. Kenaikan biaya impor energi berpotensi menaikkan harga bahan bakar, transportasi, listrik, dan barang yang dikirim. Perusahaan angkutan menghadapi biaya bahan bakar; petani menghadapi biaya pompa dan distribusi; rumah tangga menghadapi ongkos perjalanan dan harga kebutuhan. Guncangan yang sama menghasilkan paparan berbeda menurut penggunaan energi, lokasi, pendapatan, dan pekerjaan.

Pemerintah dapat mempertahankan harga tertentu melalui subsidi dan kompensasi, memberikan bantuan tunai tambahan, memperluas transportasi publik, atau mengombinasikan instrumen. Evaluasi perlu menanyakan: berapa kenaikan biaya yang berhasil tidak diteruskan; apakah bantuan diterima

sebelum pengeluaran rumah tangga melonjak; apakah pengguna energi tinggi menerima proporsi manfaat yang terlalu besar; apakah pasokan tetap tersedia; berapa risiko fiskal jika harga bertahan enam atau dua belas bulan; dan apakah dukungan mempertahankan layanan serta pekerjaan.

Subsidi universal mungkin lebih cepat menahan harga pada titik penjualan, tetapi mahal dan kurang progresif. Bantuan tunai yang tepat sasaran lebih fokus pada daya beli namun bergantung pada data dan kecepatan penyaluran. Kombinasi dapat menjadi pilihan: stabilisasi sementara untuk mencegah disrupsi luas, disertai transfer terarah dan jadwal penyesuaian yang transparan. Namun kombinasi tersebut tetap perlu dievaluasi dengan data, bukan diasumsikan unggul.

Apabila harga global turun, pemerintah perlu meninjau apakah subsidi dan kompensasi dapat disesuaikan, apakah tagihan tertunda sudah dibayar, dan apakah ruang fiskal diarahkan pada ketahanan energi, transportasi publik, atau perlindungan sosial. Dengan demikian, respons tidak berhenti pada penahanan dampak, tetapi juga mengurangi paparan terhadap guncangan serupa pada masa depan.

11. Kesimpulan

APBN Indonesia memiliki instrumen yang nyata untuk melindungi masyarakat dari shock global: subsidi dan kompensasi, bantuan sosial, transfer ke daerah, belanja pangan, kesehatan dan pendidikan, investasi publik, serta pembiayaan yang dapat menahan kontraksi. Data realisasi hingga September 2026 menunjukkan dukungan fiskal dalam skala besar dengan defisit 1,24% PDB. Studi terbaru Indonesia juga mengidentifikasi subsidi BBM sebagai salah satu saluran yang dapat meredam transmisi guncangan global.

Namun, bukti tersebut belum cukup untuk menyatakan bahwa APBN melindungi semua kelompok secara memadai. Penilaian memerlukan data mengenai ketepatan sasaran, kecukupan manfaat, waktu penyaluran, cakupan,

kesinambungan layanan, dampak pekerjaan, biaya per manfaat, serta kewajiban fiskal masa depan. Angka realisasi mengukur pelaksanaan keuangan, bukan hasil kesejahteraan dengan sendirinya. Indikator makro dapat menutupi perbedaan yang besar antara rumah tangga dan wilayah.

Dengan demikian, jawaban yang berimbang ialah: APBN dapat dan memang digunakan sebagai peredam sebagian shock, tetapi tingkat perlindungannya bersyarat, berbeda antarprogram, dan belum dapat disimpulkan hanya dari besarnya belanja atau stabilnya angka agregat. Perlindungan menjadi lebih efektif ketika instrumen cocok dengan jalur guncangan, bantuan tepat waktu dan tepat sasaran, layanan dasar tetap berfungsi, dan biaya serta risiko dilaporkan secara terbuka.

Ke depan, prioritasnya ialah membangun perlindungan sosial adaptif, memperbaiki penargetan subsidi, menjaga bantalan fiskal, mengukur dampak pada kelompok paling terpapar, serta menghubungkan respons darurat dengan investasi produktivitas dan ketahanan. APBN yang kuat bukan anggaran yang menahan setiap perubahan harga selamanya, melainkan anggaran yang mencegah guncangan menjadi krisis kesejahteraan sambil mempertahankan kemampuan negara melindungi masyarakat pada krisis berikutnya.

Refleksi dan diskusi

1. Apakah stabilitas harga energi lebih efektif melindungi rumah tangga daripada transfer tunai terarah? Data apa yang diperlukan untuk membandingkannya?

2. Bagaimana mengidentifikasi keluarga yang rentan terhadap shock tetapi belum tercatat dalam basis data bantuan sosial?

3. Apakah defisit yang terkendali cukup untuk menyimpulkan bahwa APBN berhasil, atau diperlukan indikator kesejahteraan dan layanan?

4. Bagaimana merancang subsidi yang melindungi daya beli sekaligus mendorong penggunaan energi yang efisien?

5. Siapa yang harus menanggung biaya ketika guncangan global berlangsung lama: konsumen, badan usaha, pembayar pajak sekarang, atau generasi mendatang?

Glosarium

APBN: rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

Bantalan fiskal: ruang atau cadangan keuangan yang memungkinkan pemerintah merespons guncangan tanpa mengganggu keberlanjutan anggaran.

Counterfactual: keadaan pembanding yang memperkirakan apa yang terjadi tanpa suatu kebijakan.

Defisit anggaran: keadaan ketika belanja pemerintah melebihi pendapatan dalam periode tertentu.

Insidensi manfaat: pembagian manfaat kebijakan di antara kelompok penduduk atau pelaku ekonomi.

Keseimbangan primer: selisih pendapatan dan belanja di luar pembayaran bunga utang.

Perlindungan sosial adaptif: sistem bantuan yang dapat memperluas atau menyesuaikan cakupan ketika terjadi krisis atau guncangan.

Shock global: perubahan eksternal yang cepat dan bermakna pada harga, permintaan, keuangan, perdagangan, atau pasokan internasional.

Shock absorber: instrumen atau mekanisme yang menyerap sebagian dampak guncangan agar tidak seluruhnya diteruskan kepada masyarakat atau ekonomi.

Subsidi energi: dukungan fiskal yang menurunkan biaya atau harga energi bagi penerima atau penyedia tertentu.

Targeting error: kesalahan inklusi atau eksklusi dalam penetapan penerima program.

Transfer ke daerah: penyaluran dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung layanan dan pembangunan.

Daftar Pustaka

Asido, P. T., & Ragimun. (2026). Global shock transmission to the budget deficit: The role of fuel subsidies as fiscal shock absorbers. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 11*(3). https://doi.org/10.33105/itrev.v11i3.1482

Bank Indonesia. (2026, October 22). *Laporan kebijakan moneter triwulan III 2026*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-III-2026.aspx

Coady, D., Parry, I., Sears, L., & Shang, B. (2015). How large are global energy subsidies? *IMF Working Paper, 15*(105). https://doi.org/10.5089/9781513532196.001

Gentilini, U., Almenfi, M., Dale, P., Lopez, A. V., Mujica, I. V., Quintana, R., & Zafar, U. (2022). *Social protection and jobs responses to COVID-19: A real-time review of country measures*. World Bank. https://doi.org/10.1596/37627

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, October). *APBN KiTa: Kinerja dan fakta, edisi Oktober 2026*. https://www.kemenkeu.go.id/APBNKITAOktober2026

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, October 8). *Menkeu: APBN menumbuhkan perekonomian dan melindungi masyarakat*. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/APBN-Tumbuhkan-Perekonomian

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, October 9). *Di tengah ketidakpastian global, APBN tetap on track dan ekonomi Indonesia terus tumbuh*. https://www.fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2026/10/09/4620-di-tengah-ketidakpastian-global-apbn-tetap-on-track-dan-ekonomi-indonesia-terus-tumbuh

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026*. https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/507d21b0-2abe-4d75-86aa-dc3efe505843

Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.

World Bank. (2022). *The state of social safety nets 2022*. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1885-6

Catatan data

Angka realisasi APBN merujuk pada publikasi Kementerian Keuangan edisi Oktober 2026 dengan data sampai 30 September 2026. Angka kurs dan inflasi

merujuk pada laporan Bank Indonesia yang terbit Oktober 2026. Semua data digunakan sebagai potret historis bertanggal, bukan proyeksi.